

BAB II

LITERATUR RIVIEW

2.1. Pengaruh dan Tipe Budaya Politik

Dalam memperkuat peneliti dalam mengolah dan analisis data di lapangan peneliti menggunakan beberapa kajian terdahulu yang menurut peneliti memiliki keterhubungan dengan kajian yang peneliti lakukan yaitu terkait masyarakat Suku Laut. Kajian budaya politik masyarakat diperlukan untuk melihat sejauh mana budaya politik masyarakat itu sendiri sebagai wujud masyarakat demokrasi. (Ilyas Abdullah dkk, 2018; Achmad Munif Khoirul, 2015; Jumili Arianto, 2017) kesadaran masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi akan menjadi tolak ukur berkembangnya budaya politik masyarakat dalam menjamin terciptanya masyarakat demokrasi yang adil dan makmur, bukanlah masyarakat yang menjadi panggung bermain para elit politik. Justus K. Musya, dkk (2017) mengungkapkan adanya penggunaan kekerasan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan politik diatur dan dimungkinkan oleh elit politik, yang menggunakan etnis untuk mencapai tujuan politik.

Berbicara mengenai budaya politik mestinya tidak akan pernah lepas dari tingkah laku dan pola keluaran sikap masyarakat dalam menanggapi sistem politik. Pengetahuan dan kesadaran sangat diperlukan rangka mengawal sistem politik yang berjalan. Indonesia merupakan negara multikultural, di mana mutan-muatan suku

bangsa sangat beragam, hal ini akan memberikan sikap politik yang berbeda-beda pula. Adanya perbedaan itulah yang mendukung bahwa kajian budaya politik diperlukan agar bisa menjadi sasaran petunjuk dalam merealisasikan kebijakan. Menurut penelitian Ida Bagus Brata (2016) bahwa kearifan lokal yang dimiliki Negara Indonesia dapat dijadikan sebagai Perekat sekaligus sebagai modal dasar untuk memperkokoh identitas atau jati diri bangsa. Suatu daerah mungkin saja tidak akan kebutuhannya dengan daerah lain, budaya politik akan menjadi pengukuran yang bersifat tidak pasti namun cara ini tetap dibutuhkan dalam mengimbangi dan mengambil jalan tengah antara kebutuhan masyarakat.

Menurut kajian (Alip Susilo utama, 2016; Ahmad Mustanir, 2016; Babul Bahrudin, dkk, 2016) budaya matrelineal, kepemimpinan dan agama akan mempengaruhi budaya politik, baik dalam Pemilu maupun sikap dan perilaku politik masyarakat. Lebih lanjut Imam Maulana Yusuf (2015) Sistem nilai dalam masyarakat lokal dapat memberikan pengaruh dalam penentuan atau pengambilan keputusan oleh Pemerintah, kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah. Sementara menurut kajian (Anggun Aprillia Wardhanie, 2017; Ayu Lastari, 2018) tiga faktor yaitu pendidikan, media Massa dan imbalan (ekonomi) yang mempengaruhi budaya politik masyarakat dengan tipe budaya politik Subjek-partisipan. Tentunya jika mengulas lebih dalam ada banyak lagi faktor yang memungkinkan membentuk budaya politik masyarakat, namun dalam hal ini bagaimana dan sejauh mana perkembangan

budaya politik masyarakat tentunya menjadi aspek yang harus kita lihat. Berbeda dengan kajian Mohd Ezril Mohd (2018) mengatakan kebergantungan terhadap media sosial bagi tujuan sosialisasi politik memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan dengan pengetahuan politik, perubahan budaya politik secara signifikan dipengaruhi oleh faktor etnis.

2.2. Perkembangan Budaya politik Masyarakat

Beberapa kajian terkait perkembangan budaya politik masyarakat seperti kajian, (Yusuf, A. M, 2017; Rahma Surya Dewi, dkk 2017) kemunculan budaya lama, kemudian pandangan agama dan masalah rasial hari ini akan membawa pada perkembangan budaya politik masyarakat dan tidak menutup suatu kemungkinan akan mengkotak-kotakkan masyarakat. Kajian Ahmad Faidi (2018) mengungkapkan sejarah kekhalifahan bukanlah merupakan bagian dari doktrin agama, melainkan tak lebih hanya sekedar konstruksi budaya politik masyarakat Arab pada saat itu. Perkembangan budaya politik hari ini bisa saja mengarah kepada jenis liberalisme baru yang kuat dengan politik identitas atau mengarah pada budaya politik yang modern sekalipun dalam menentukan pilihan menggunakan sikap tradisional (Emile Chabal, 2016; A. M. Fauzi, dkk 2017). Menurut Jake Christopher Richards (2017) ada tiga tren budaya politik yaitu kelompok yang lebih tua

membayangkan pemberontakan sebagai indikasi kesadaran nasionalis, adanya politik protes yang terjadi di lokal dan adanya budaya politik yang dinamis antar kelompok. Sementara menurut Wasino (2015) Terdapat tiga prinsip budaya politik di Mangkunegara yang akan membawa pada perubahan etika dan modernisasi birokrasi yakni mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, melu hangrungkebi.

Lajunya perkembangan budaya politik masyarakat hari ini hampir tidak sebanding dengan tingkat pengetahuan dalam berpolitik, beberapa kajian mengungkapkan perlunya pendidikan politik dikalangan masyarakat seperti kajian (Jumili Arianto, 2017; Payerli Pasaribu, 2017) perubahan budaya politik hanya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju namun tidak untuk daerah terpencil dan peran penting partai politik adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat pedesaan yang kurang maju pada dasarnya masih memegang erat etika dan budaya yang mereka bawa secara turun temurun. Dwi Rianto Jatmiko, dkk (2019) Penelitiannya mengatakan pengaruh politik masyarakat budaya pada dasarnya membuat budaya politik komunitas masyarakat lebih beradab. Selanjutnya Claudia Favarato (2019) Mengungkap bahwa pentingnya agama tradisional dalam budaya politik sebagai pengimbang lajunya arus perkembangan politik.

Budaya politik masyarakat hari ini di Negara demokrasi tidak akan lepas dengan politik Pemilu, artinya keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat

dalam pemilihan umum juga bisa menjadi suatu bingkai ukuran bagaimana budaya politik masyarakat disuatu daerah. Nursyirwan Effendi (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan pentingnya memahami kondisi politik Pilkada yang kondusif tidak membangun suasana konflik dan membangun rasa persaudaraan untuk mencapai pada budaya politik yang khas. Lebih lanjut Sumartono (2018) mengungkapkan pada masyarakat yang budaya politik pragmatis akan sulit menjamin kemurnian dukungan dan lahirnya pemimpin yang memiliki kepekaan sosial masyarakat. Pada era demokrasi menurut Indra Fauzan, Nidzam Sulaiman (2019) Budaya politik masyarakat kelas menengah yang disertai nilai-nilai sivil merupakan pemantik proses pendemokrasian masyarakat dan pendemokrasian merupakan suatu keniscayaan.

2.2. Masyarakat Suku Laut

Penelitian ini merupakan penelitian terkait budaya politik yang penulis lakukan di masyarakat Suku Laut yaitu kalangan masyarakat bawah atau bisa dikatakan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT). Beberapa penelitian terdahulu telah membicarakan terkait Suku Laut. Menurut kajian (Haryono Supentri, 2016; Desma Yulia, 2017; Hasbullah Pawira, 2017; Firdaus, 2016) telah terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat Suku Laut yang saat ini belum mampu diberdayakan oleh pemerintah, baik itu perubahan dari segi penggunaan bahasa maupun sendi-sendi kehidupan lain, hal tersebut

dipengaruhi oleh faktor Agama, teknologi, pendidikan, geografis, interaksi sosial dan pemerintah.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang telah peneliti telaah di atas, maka peneliti akan mencoba memahami terkait budaya politik. Adapun subjek penelitian adalah masyarakat Suku Laut dalam Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015. Lokasi penelitian akan bertempat di Kampung Baru, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga yang merupakan kampung pemukiman masyarakat Suku Laut. Berbagai kajian mengenai budaya politik yang telah penulis ulas diatas kiranya lebih membahas pada aspek-aspek pengaruh yang membentuk budaya politik, perkembangan budaya politik masyarakat, tipe budaya politik dan kearifan lokal sebagai penyalur lajunya perubahan budaya politik masyarakat.

Pada tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana budaya politik masyarakat Suku Laut beserta dengan tipe dan faktor yang mempengaruhinya akan tetapi lebih kepada pengukuran bagaimana kesiapan dari masyarakat Suku Laut itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkada. Kesiapan yang penulis maksud apakah ke depan harus adanya pembatasan kampanye politik bagi partai politik maupun wewenang pemerintah dalam hal melibatkan masyarakat atas urusan Negara, namun lebih mengedepankan pembelajaran politik terutama pada masyarakat yang kurang pendidikan politik Pilkada.

Lebih lanjut penulis melihat belum adanya kajian Suku Laut yang menelaah dari sudut pandang budaya politik.

Beberapa kajian pustaka di atas yang mengkaji terkait budaya politik dan Suku Laut tersebut, peneliti melihat khusus kajian budaya politik peneliti-peneliti terdahulu melakukan penelitian pada masyarakat yang memang sudah biasa dengan proses-proses politik. Sementara kajian yang akan penulis lakukan adalah pada masyarakat Suku Laut yang mana merupakan masyarakat baru dalam proses politik. Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 merupakan Pilkada Gubernur pertama yang Suku Laut ikut serta di dalamnya. Selanjutnya khusus terkait penelitian terdahulu yang mengkaji Suku laut penulis melihat minimnya adanya penelitian yang mengkaji terkait aspek politik masyarakat suku laut, padahal fenomena yang terjadi masyarakat Suku Laut telah ikut serta dalam proses politik. Sehingga kajian budaya politik Suku Laut menjadi penting mengingat Suku Laut merupakan masyarakat generasi baru di dalam kehidupan sosial politik.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang telah peneliti telaah di atas, maka peneliti akan mencoba memahami Suku Laut dari sudut pandang budaya politik masyarakat Suku Laut, yang memang belum menjadi telaah dari penelitian terdahulu. Penelitaian dengan metodologi penelitaian deskriptif kualitatif, mencakup beberapa hal yang ingin digambarkan oleh peneliti,

pertama, gambaran budaya politik Suku Laut, *kedua*, faktor yang membentuk budaya politik masyarakat Suku Laut, *ketiga*, Kesiapan masyarakat Suku Laut menghadapi Pilkada. Kajian Suku Laut yang penulis maksud di sini merujuk pada konsep budaya politik yang dirumuskan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba yang mana memperhatikan pola sikap dan orientasi terhadap objek-objek politik.

2.3. Teori Budaya Politik

Konsep budaya politik muncul untuk mengukur pola orientasi politik masyarakat yang ada dalam sistem politiknya, juga erat kaitannya dengan sikap dan tingkah laku individu dalam sistem politik. Menurut Sitepu, (2012: 163) menyatakan konsep budaya politik muncul, sejak tahun 1950 saat budaya politik (*political culture*) menjadi alat analisis dalam ilmu politik. Di bawah ini pengertian budaya politik menurut para ahli.

Mariam Budiardjo (2008: 58) “budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya”.

Wijaya, 1982 menyatakan “budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang meliputi ide-ide, pengetahuan, adat istiadat, mitos dan lain-lain yang dikenal dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat” (dalam Lubis, 2008: 91)

Roy Macridis (dalam Maksudi, 2012: 49) “budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama”.

Widjaja (1988: 250) “budaya politik menyangkut masalah sikap dan norma-norma membentuk sikap normatif seseorang terhadap suatu gejala-gejala; benar atau salah, baik atau buruk, suka atau tidak suka”.

Rusadi Sumintapura (dalam Chotib, dkk, 2007: 4) “Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik”.

Kantaprawira (1999: 26) “budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, sebab sistem politik itu adalah interelasi antara manusia yang mana berkaitan soal kekuasaan dan aturan serta wewenang”.

Merepresentasikan pengertian budaya politik yang telah dipaparkan atas, memberikan pemahaman konsep yang menyatukan dua tingkat orientasi politik, yaitu individu dan sistem. Dalam orientasi yang sifatnya individual atau dilakukan oleh seseorang, tidak memberikan arti kepada kita bahwa dalam memandang suatu sistem politik kita beranggapan bahwa masyarakat akan cenderung individualisme.

Pandangan Pye (dalam Lubis, 2008: 94) “budaya politik membuat lebih eksplisit dan sistematis pemahaman yang berkaitan dengan konsep-

konsep yang sudah lama mapan, seperti ideologi politik, etos dan semangat nasional, dan ini adalah fundamental masyarakat”. Almond dan Verba (1984: 16) mengartikan “budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu”.

Lebih lanjutnya Almond dan Verba merumuskan orientasi politik dengan mengikuti rumusan Parson dan Shils, tiga objek politik tersebut yaitu;

a. “Orientasi kognitif: pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya”.

b. “Orientasi afektif: perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya”.

c. “Orientasi evaluative: keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan”.

Orientasi kognitif, adalah bagaimana kemampuan seseorang individu yang berkaitan dengan kepercayaannya serta keyakinannya terhadap jalannya suatu sistem politik dan atribut yang mengikutinya, seperti pemegang jabatan, tokoh pemerintahan, negara, eksekutif, legislatif, kebijakan, kepala negara, bentuk negara, mata uang dan lain sebagainya.

Orientasi afektif dalam hal ini berkaitan dengan perasaan emosional yang dimiliki seorang individu ketika berhadapan dengan sistem politik. Hal

ini mengacu pada perasaan warga negara akan sistem politiknya dan perasaan yang dapat membuat seseorang menerima atau bahkan menolak sistem politik tersebut. Mengenai orientasi evaluatif dalam hal ini membicarakan kemampuan atau kapasitas seseorang atau individu dalam upaya memberikan penilaian serta respon pada sistem politik yang berjalan dan melihat bagaimana peranan individu tersebut didalamnya.

Almond dan Sidney Verba (1984: 17) memuat untuk gambaran dan pendekatan tentang orientasi individu terhadap budaya politik, yang mana perlu dilakukannya orientasi yang bersifat pengetahuan, kemudian keterlibatan individu dan evaluasi terhadap objek politik tersebut. Dibawah ini memuat objek orientasi yang dijabarkan melalui bagian sistem politik yang dibedakan tiga golongan objek:

- a. "Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, atau birokrasi".
- b. "Pemegang jabatan; seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator".
- c. "kebijaksanaan, keputusan, atau penguatan keputusan, struktur, pemegang jabatan dan struktur secara timbal balik dapat diklasifisir apakah mereka termasuk dalam proses atau input politik atau dalam proses administratif atau output".

Almon dan Verba (1984) telah mengklasifikasi orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif sikap terhadap objek politik untuk menggambarkan suatu tipology budaya politik yang ideal, orang-orang yang ikut terlibat, subyek dan daerah. Orientasi itu positif bagi semua obyek, mereka mengatakan bahwa budaya politik itu adalah hal yang turut berpartisipasi. Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat.

Kemudian orientasi individu terhadap sistem politik atau orientasi individu terhadap pemerintah memberikan keterangan kepada kita bahwa orientasi individu dapat dibuka secara sistematis. Almond dan Verba (1984: 19) menjabarkannya sebagai berikut:

- a. “Pengetahuan apa yang dimiliki seseorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat konstitusionalnya dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini? Dan bagaimana pula pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik itu?”
- b. “Bagaimana pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat upward? Bagaimana perasaan dan pendapatnya tentang segala struktur, para pemimpin dan semua proposal kebijaksanaan ini?”
- c. “Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijaksanaan yang downward, struktur-struktur, individu-individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu?”

Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang berkembang di di tengah-tengah masyarakat memiliki tipe-tipe sendiri. Dalam penelitian mereka yang mereka lakukan dilima negara, mereka menyimpulkan bahwa ada tiga tipe budaya politik yang terdapat di tengah individu. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan individu kerap akan mempengaruhi budaya politik masyarakat atau individu tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam individu juga akan mempengaruhi proses terbentuknya budaya politik individu itu sendiri. Interaksi-interaksi ini bisa saja memupuk timbulnya interaksi baru antar budaya, yang nantinya menjadi pemicu terbentuknya budaya politik masyarakat di suatu daerah.

Pada bagian atas telah disebutkan bahwa Almond dan Verba telah mengklarifikasikan budaya politik masyarakat atau individu dalam tipe-tipe budaya politik. sehingga kita tentunya bisa menilah bahwa tipe budaya politik suatu masyarakat mungkin akan sangat berbeda dengan tipe budaya politik suatu kelompok masyarakat lain, hal tersebut mungkin saja memiliki perbedaan faktor yang mempengaruhinya, seperti ekonomi, budaya, sosial, ideologi dan bahkan geografisnya masyarakat. Tipe-tipe budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba adalah, budaya politik parokial, budaya politik subjek, budaya politik partisipan dan budaya politik campuran.

2.4.1. Budaya Politik Parokial

Almond dan Sidney Verba (1984: 20) mengemukakan “orientasi parokial menyatakan adanya harapan-harapan akan perubahan yang komperatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik”. Pada tingkatan parokial partisipasi atau pranan politiknya sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh faktor kognitif yang tidak mendukung. Budaya politik parokial akan terlihat juga pada tahap statisnya harapan harapan individu terhadap perubahan ke depan dari sistem politik.

Kebudayaan politik parokial, memberi arti bahwa masyarakat lebih cenderung statis terhadap sistem politik yang ada. Tingkat kepeduliannya terhadap objek sistem politik tidak menjadi menarik bagi mereka. Minat mereka terhadap sistem politik tidak luas dan hanya dalam batas-batas tertentu. Keadaan demikian wajar saja terjadi, dan biasanya terjadi pada masyarakat yang belum terlalu berkembang, dimana pengetahuannya tentang politik sangat minim. Almond dan Verba (1984: 21) mengemukakan “secara relatif parokialisme murni itu berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yang minim. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif ketimbang kognitif”.

2.4.2. Budaya Politik Subjek/Kaula

Orientasi politik pada individu atau masyarakat subyek terhadap objek politik bisa kita lihat dari bagaimana penyampaiannya, bisa saja berupa suatu kebanggaan, kemudian dukungan atau tidak mendukung terhadap sistem yang ada. Pendapat Almond dan Verba (1984:21) “budaya politik subyek memiliki frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif, mendekati nol”. Kesadaran akan sistem politik dalam bagi kaum subyek sangat baik namun keterlibatan mereka dalam sistem itu sangat rendah. Kaum subyek bisa saja menerima bisa saja menolak sistem politik yang ada, namun kesemuanya hanyalah bersifat pasif terhadap sistem tersebut.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Kantaprawira (2006:33) bahwa “budaya politik Subjek adalah, dimana masyarakat mempunyai minat, perhatian dan kesadaran terhadap sistem politik, terhadap segi output, akan tetapi terhadap aspek input serta peranannya sebagai aktor politik, bisa dikatakan nol”. Orientasi subyek terhadap sistem politik telah membuat perantara demokrasi sifatnya lebih afektif dan normatif dibanding kognitif.

Meskipun kaum subyek mengetahui dan memiliki kesadaran akan sistem politik yang ada, namun kaum subyek menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem politik. Kaum subyek akhirnya mengikuti saja keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku

dalam sistem politik yang diambil oleh para pemegang jabatan. Apapun keputusan yang telah diambil dianggap sebagai suatu yang final dan tidak bisa lagi diubah olehnya. Perkembangan demokrasi akan sulit apabila berhadapan dengan kaum subyek, karena mereka merupakan masyarakat yang tidak aktif dalam sistem politik yang ada, meskipun mereka mengetahui akan sistem politik tersebut.

2.4.3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik Partisipan mengandung bahwa tingkatan perhatian dan kesadaran akan sistem politik sangat tinggi. Orang partisipan mengambil berat urusan keluaran maupun masukan kebijakan dari sistem politik. Mereka yang tergolong partisipan sadar betul bahwa dirinya dan orang lain mempunyai tanggung jawab akan sistem politik yang ada, sehingga kaum partisipan bisa dikatakan memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap sistem politik. Almond dan Verba (1984:22) berpendapat “budaya politik partisipan adalah suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif, dengan kata lain, terhadap aspek input dan output dari sistem politik itu”.

Masyarakat dalam budaya politik partisipan sangat memahami bagaimana mereka menggunakan hak-hak politiknya. Kebijakan yang politik yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan tidak begitu saja mereka terima,

melainkan mereka mereka menelaah dan apabila perlu dilakukannya perubahan terhadap kebijakan tersebut, mereka tidak ragu untuk menyuarakan dan meminta untuk dilakukannya perubahan.

2.4.4. Budaya Politik Campuran

Budaya politik campuran mengandung arti dari ketiga tipe budaya politik, yaitu budaya politik parokial, budaya politik subyek dan budaya politik partisipan. Budaya politik yang terdapat disuatu negara atau suatu daerah terkadang tidak terpaku pada satu tipe budaya politik saja, sekalipun masyarakatnya tergolong masyarakat yang maju yang berarti mereka termasuk kaum partisipan, akan tetapi tetap saja masih ada sebagian dari mereka yang masih tergolong dalam budaya politik subyek maupun parokial. Sehingga kombinasi inilah yang dikatakan budaya politik campuran.

Almond dan Verba (1984: 27-31), memaparkan tiga tipe budaya politik campuran, adalah:

1. “Kebudayaan subyek parokial, adalah suatu tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus”.
2. “Kebudayaan partisipan subyek, adalah cara bagaimana proses peralihan dari kebudayaan parokial menuju kebudayaan subyek dilakukan pasti akan mempengaruhi cara bagaimana proses peralihan dari budaya subyek menuju budaya partisipan berlangsung”.
3. “Kebudayaan parokial partisipan, adalah dalam kebudayaan politik ini kita mendapat masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di sejumlah negara yang sedang berkembang. di hampir

semua negara ini budaya politik yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan; demi keselarasan, mereka menuntut suatu kultur partisipan”.

Budaya politik campuran memberikan penerangan bahwa tidak ada kepastian dalam suatu negara atau masyarakat terhadap budaya politiknya. Sehingga dalam hal ini budaya politik campuran dibutuhkan agar lebih mudah menginisiasikan keadaan kebudayaan politik masyarakat. Menggunakan satu tipe budaya politik terhadap masyarakat belum berarti telah mewakili dari budaya politik yang ada dalam masyarakat, sehingga itulah perlu adanya budaya politik campuran.

Terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka pendekatan budaya politik Almond dan Verba akan peneliti gunakan sebagai acuan dalam memahami budaya politik Suku Laut Kabupaten Lingga. Kebudayaan politik menjadi sangat menarik jika berbicara dalam ruang lingkup keilmuan politik. Sehingga peneliti merasa bahwa ada kesesuaian teori Almond dan Verba ini untuk peneliti gunakan dalam penelitian, dalam upaya memahami budaya politik Suku Laut Kecamatan Singkep Barat. Kajian pendekatan budaya politik Almond dan Verba menurut peneliti bisa digunakan sebagai suatu pendekatan dalam melihat konteks budaya politik Suku Laut Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

2.5. Partisipasi Politik

Menurut Mariam Budiardjo, (2008: 367). “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Verba, Schlozman dan Brady (Mujani, 2007: 257) “partisipasi politik adalah tindakan sukarela, yang berarti bahwa para pesertanya tidak dipaksa untuk melakukannya dan tidak dibayar”.

Menurut Huntington dan Nelson, (1994: 6). “Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara atau tindakan individu warga yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah”.

Menurut Ramlan Surbakti, (Abdulkarim, 2006: 7) mengemukakan bentuk partisipasi yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

“Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga Negara untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakn umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah”.

“Partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah”.

Untuk melihat lebih dalam terhadap partisipasi politik, Huntington dan Nelson, (1994: 16-18), mengemukakan bentuk dan landasan partisipasi sebagai berikut;

- a. Kegiatan pemilihan mencakup Suara, kegiatan yang mendukung proses kampanye, mencari dukungan bagi seorang calon dan kegiatan-kegiatan yang memuat tujuan mempengaruhi hasil dalam pemilihan.
- b. Lobby yaitu yang berkaitan dengan upaya seseorang atau kelompok-kelompok untuk menjalin hubungan dengan pemerintah maupun pemimpin-pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut orang ramai.
- c. Kegiatan Organisasi, hal ini berkaitan dengan ikut terlibatnya seseorang dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan.
- d. Contacting atau mencari koneksi, merupakan kegiatan seseorang yang ditujukan kepada pejabat politik tertentu, berharap untuk mendapatkan manfaat bagi individu atau segelintir orang.
- e. Tindakan Kekerasan (violence), tindakan ini dilakukan oleh individu atau kelompok bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, namun dilakukan dengan berdampak menimbulkan kerugian fisik terhadap seseorang atau harta kepemilikan.

Adapun Landasan partisipasi (1994: 21) adalah sebagai berikut;

1. Kelas: perorangan dengan status sosial, pendapatan, pendapatan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnis yang sama.

3. Lingkungan (*Neighborhood*): perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
4. Partai: perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
5. Golongan (*faction*): perorangan- perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, manifestasinya adalah pengelompokan patron klien, berarti seseorang yang melibatkan pertukaran memanfaatkan secara timbal balik antara seseorang yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Dalam mengukur partisipasi masyarakat khususnya kelas bawah (kaum miskin), Huntington dan Nelson memberikan beberapa bentuk pola partisipasi yang biasanya terjadi dikalangan kelas bawah, antara lain:

1. Mengadakan kontak khusus yaitu tindakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah individual yang spesifik dengan bentuk tindakan mengajukan petisi menyuap dan lain-lain.
2. Partisipasi yang dimobilisasikan yaitu partisipasi yang dipimpin oleh kepala suku atau tetua marga, patron, tuan tanah atau lainnya, dengan tujuan kepala suku atau patron tersebut adalah memperbaiki masalah sendiri dan komunitas, memperoleh pratise dan kadang memperoleh keuntungan materi, sementara para partisipan berpenghasilan bertujuan menyenangkan patron, pimpinan sebagai yang disegani oleh mereka, dengan tindakan berkampanye, memberikan suara dan demonstrasi.
3. Golongan kecil dengan kepentingan khusus yaitu orang-orang setempat yang berpengaruh, organisator dermawan dengan tujuan memecahkan

masalah sendiri dan komunitas dan tujuan partisipan memperbaiki keadaan sendiri dan keadaan komunitas, melalui fasilitas-fasilitas sumur, jalan, aliran listrik, dengan tindakan menawarkan imbalan dengan suara seluruh kelompok dan mengajukan petisi.

4. Partai atau gerakan yang menembus batas-batas kelas yaitu partisipasi yang datangnya dari kaum elit, politisi bertujuan membela dan memajukan kepentingan nasionalis daerah atau etnik, ekonomi atau simbolik, dan tujuan partisipan memiliki tujuan yang sama dengan pemimpin dengan kecenderungan sikap yang kolektif.
5. Orientasi kelas bawah secara besar-besaran yaitu partisipasi yang datangnya dari politisi kaum elit atau kelas menengah dengan tujuan komitmen ideologi atau jawaban terhadap persaingan politik, sedangkan tujuan partisipan memperbaiki keadaan ekonomi sendiri dan sesamanya dengan cara memberikan suara, kampanye dan demonstrasi.

Konsep partisipasi lebih lanjut dikemukakan oleh Roth dan Wilson, (Budiardjo, 2008: 373), yang mana memaparkan dalam bentuk piramida partisipasi politik yaitu;

1. Aktivistis (*activists*)-termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, teroris, pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.
2. Partisipan (*participants*)-orang yang berkerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok

kepentingan dan tindakan yang bersifat politis, orang yang terlibat dalam komunitas proyek.

3. Penonton (*onlookers*)-orang yang menghindari reli-reli politik, anggota dan kelompok kepentingan, *pe-lobby*, pemilih, orang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik.
4. Apolitis (*apoliticals*).

Partisipasi politik yang berlaku pada individu atau kelompok tentunya memiliki faktor yang mempengaruhinya. Menurut Ramlan Surbakti, (1999: 132) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu;

1. Lingkungan sistem politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa;
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan;
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu memuat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri.
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Dalam upaya melihat partisipasi politik masyarakat secara makro Huntington dan Nelson, (1994: 66), melihat pembangunan ekonomi dan persamaan tarap ekonomi memiliki hubungan yang besar terhadap partisipasi politik. Secara mikro seiring berkembangnya masyarakat, status sosial, kesempatan-kesempatan mobilitas kontek keorganisasian, migrasi, eksploitasi, perang, agresi, kepemimpinan politik, dan perbedaan ideologi serta keagamaan juga memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik.

Almond dan Verba, (1984: 345-357) memberikan pandangan partisipasi sosial dan kompetensi warga Negara yang nantinya akan mempengaruhi sikap dalam politik sebagai berikut;

1. Partisipasi keluarga dan kompetensi warga Negara yaitu mereka yang dapat mengungkapkan dirinya dalam keputusan keluarga cenderung memberi nilai tertinggi dalam kompetisi politik subyektif dibanding mereka yang tidak dapat mengungkapkan dirinya dalam keputusan keluarga.
2. Partisipasi sekolah dan kompetensi warga Negara yaitu partisipasi informal di sekolah lebih terkait erat dengan kompetisi politik diantara mereka yang pendidikan terbatas dibanding mereka yang pendidikan tinggi.
3. Partisipasi dalam pekerjaan dan kompetensi politik yaitu adanya hubungan luasnya kesempatan berpartisipasi dalam tempat kerja akan mempengaruhi politik subyektif.

Faktor-faktor tersebut merupakan hal dasar dalam kehidupan partisipasi politik. Sehingga dengan faktor tersebut menjadi tolak ukur untuk melihat pola yang mempengaruhi perilaku dan sikap partisipasi seseorang atau kelompok. Sebagaimana Huntington dan Nelson, (1994: 19) bahwa kita tidak boleh berandai karena satu golongan kurang berpartisipasi dalam pemungutan suara dibanding golongan lain sehingga kita menganggap partisipasinya

dalam bentuk lain sedikit, hal itu mungkin saja sedikit namun tidak harus begitu. Artinya masih banyak kemungkinan partisipasi politik dalam bentuk lain yang bisa wujud dalam suatu golongan atau kelompok.

2.6. Perubahan Politik

Perubahan politik mendapat perhatian dari beberapa penulis yang berfokus pada keilmuan sosial, secara umum teori perubahan politik dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu;

1. Teori perubahan komponensial
2. Teori perubahan krisis
3. Teori perubahan kompleks

Menurut Huntington (Varma, 1987: 490), dalam perubahan politik komponensial, suatu sistem politik terdiri atas lima bagian, yaitu kebudayaan, struktur, golongan (group), kepemimpinan dan kebijaksanaan. Sehingga untuk melihat suatu perubahan politik kita harus menganalisa keseluruhan komponen-komponen tersebut melihat setiap bagian-bagiannya dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Komponen yang tingkat kecepatannya dan jangkauannya lebih dominan antara komponen satu dengan komponen lainnya menjadi tumpuan analisa dalam melihat hal yang mempengaruhi perilaku politik individu atau kelompok dalam masyarakat.

Dalam teori perubahan politik krisis Almond dan Rustow (Varma, 1987: 491), melihat perubahan politik dimulai dari keadaan yang tidak dengan

situasi yang ada, dan kemudian melahirkan aksi politik. Aksi politik bisa melalui organisasi yang berkaitan erat dengan kekuasaan politik yang ingin diraih.

Perubahan politik kompleks menurut Brunner dan Brewer (Varma, 1987: 492) terdapat beberapa variabel, yaitu Demografi, ekonomi, politik dan pembuat kebijaksanaan (*policy makers*).

Untuk melihat kemurnian dari perilaku politik individu atau kelompok dalam masyarakat maka penulis meletakkan dua kategori tatanan politik, yaitu perkembangan politik dan modernisasi politik. Kedua hal ini akan menjadi alat ukur apakah perilaku atau sikap politik yang terjadi pada individu atau kelompok masyarakat benar-benar merupakan kemurnian gerakan kesadaran akan politik oleh masyarakat atau kesadaran politik yang dipengaruhi oleh modernisasi politik.

Menurut Huntington (Varma, 1987: 494), “perkembangan politik adalah kepranataan prosedur-prosedur dan organisasi-organisasi politik dan ditandai oleh arah dan tingkat”, yang mana meliputi variabel sebagai berikut;

1. Penyesuaian yaitu ditunjukkan dengan rantai kepemimpinan yang panjang dan teratur yang berhasil menyesuaikan diri mereka dengan tantangan baru terhadap sistem tersebut.

2. Kekompleksannya yaitu ditunjukkan dengan adanya sejumlah besar pranata, yang membawa pertanggungjawaban tanpa ada halangan dari pihak lain.
3. Otonominya yaitu tidak tergantungnya pada sistem politik lain dan dikontrol penuh secara sendiri dan jelas.
4. Pertalian (*coherence*) yaitu adanya suatu konsensus pada tingkat tertentu dan persatuan internal sistem tersebut.

Sementara modernisasi politik menurut Eisenstadt (Varma, 1987: 493), “adalah proses perubahan kearah tipe-tipe sistem sosial, ekonomi, dan politik”.

Cyril Black (Varma, 1987: 493), “masyarakat sebagai modern bilamana masyarakat itu dapat menyesuaikan pranata-pranatanya yang tumbuh dari sejarah dengan penjabat-penjabatnya yang berubah dengan cepat yang mencerminkan penambahan pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan penguasaan lingkungan menyertai revolusi ilmiah”.

Perkembangan politik dan modernisasi politik hampir tidak memiliki perbedaan yang khas, namun dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Huntington memberikan persepsi baru dalam mengukur faktor yang lebih cenderung atas perilaku politik individu atau kelompok masyarakat. Individu

atau kelompok tersebut tidak menutup kemungkinan juga termasuk masyarakat Suku Laut.

2.7. Hipotesis

Penelitian terkait budaya politik masyarakat Suku Laut Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015, penulis berhipotesis bahwa masyarakat Suku Laut tergolong pada tipe kebudayaan politik Parokial yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan.